

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
TAHUN ANGGARAN 2010**



Judul : **KEBIJAKAN LEGISLASI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN DALAM
UNDANG UNDANG NO 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTIM
BUDIDAYA TANAMAN**

Peneliti : **BAMBANG SUDJITO, SH.MHum.**

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional
sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan
Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010
Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.

**Universitas Brawijaya
Malang
2010**

**LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
TAHUN ANGGARAN 2010**

1. Judul Penelitian (Hibah) : Kebijakan Legislasi Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman Dalam Undang Undang No 12 Th 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. Bidang Ilmu (penelitian) : Ilmu Hukum
3. Judul disertasi : Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Yang Terkait Dengan Sertifikasi Benih Tanaman
4. Nama dan Gelar : Bambang Sudjito, SH. MHum.
5. NIP/NIK/ID lainnya : 19520605 198003 1 006
6. Perguruan Tinggi Asal : Universitas Brawijaya
7. Perguruan Tinggi / Program Studi (tempat Studi S3) : Universitas Brawijaya / Ilmu Hukum
8. NIM dan Semester ke : 0830104002 / Semester IV
9. Alamat : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl Mayjen Haryono 169 Malang Jawa Timur
- No. telp / faks / hp : (0341) 553898 / 0341 566505 /
08123312675
- E - mail :
10. Nama Promotor : Prof. Dr. Koesno Adi, SH. MS.
11. Lama kegiatan : 6 Bulan
12. Biaya yang disetujui : Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah)
13. Lokasi Penelitian :

No	Lokasi / Laboratorium	Alamat	Pemilik / Pengelola
1.	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen Haryono - Malang	Kementerian Pendidikan Nasional
2.	Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya	Jl Veteran- Malang	Kementerian Pendidikan Nasional
3.	Perpustakaan Universitas Brawijaya	Jl Veteran - Malang	Kementerian Pendidikan Nasional
4.	UPT PSBTPH Propinsi Jawa Timur	Jl Gayung Kebonsari - Surabaya	Pemerintah Propinsi Jawa Timur
5.	Dinas Pertanian Kabupaten Kediri / Satgas PSBTPH Wilayah Kediri	Jl Tugurejo - Kediri	Pemerintah Kabupaten Kediri / Pemerintah Propinsi Jawa Timur
6.	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	Jl Pamenang - Kediri	
7.	Pengadilan Negeri Tulungagung	Jl Jayeng Kusuma - Tulungagung	

Malang, 31 Oktober 2010.

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya,

Peneliti,



Herman Suryokumoro, SH.MS.
NIP. 19569528 198503 1 002

Bambang Sudjito, SH.MHum.
NIP. 19520506 198003 1 006

Mengetahui :
Ketua LPPM Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaemi, MS.
NIP. 19530514 198002 2 001

RINGKASAN

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yang meliputi (a) mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis kualifikasi tindak pidana, yang diatur dalam pasal 61 ayat (1) huruf b dan pasal 61 ayat (2) huruf b Undang Undang No 12 Th 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, (b) mengimplementasi dan menganalisis ketentuan tindak pidana, yang diatur dalam pasal 61 ayat (1) huruf b dan pasal 61 ayat (2) huruf b Undang Undang No 12 Th 1992 tersebut, dan (c) mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan rekonseptualisasi tindak pidana yang terkait dengan sertifikasi benih tanaman dalam Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Pasal 61 ayat (1) huruf b dan Pasal 61 ayat (2) huruf b Undang Undang No 12 Th 1992. Oleh karena itu, metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang meliputi pendekatan peraturan perundang undangan atau statute approach, pendekatan konsep atau conceptual approach, dan pendekatan kasus atau case approach.

Substansi dalam penelitian ini, adalah sebagian dari substansi penelitian disertasi, yang meliputi (a) konsep sertifikasi benih tanaman; (b) konsep tindak pidana yang terkait dengan sertifikasi benih tanaman; dan (c) kebijakan legislasi melalui rekonseptualisasi tindak pidana yang terkait dengan sertifikasi benih tanaman. Dalam hal ini, penemuan konsep tindak pidana yang terkait dengan sertifikasi benih tanaman melalui teori pembentukan hukum atau rechts forming dan teori penemuan hukum atau rechts vinding terkait dengan teori sifat melawan hukum, yang ditunjang dengan keberadaan asas asas hukum dan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan, antara lain asas pembentukan, asas materi muatan, dan asas bidang hukum tertentu dalam peraturan perundang undangan di samping asas kebijakan hokum dalam peraturan perundang undangan, antara lain kebijakan nasional, kebijakan umum, kebijakan pelaksana, dan kebijakan teknis. Dengan demikian, penelitian diarahkan pada penyusunan rancangan undang undang melalui kegiatan rekonseptualisasi tindak pidana yang terkait dengan sertifikasi benih tanaman. Dalam hal ini, rekonseptualisasi atau penemuan konsep tindak pidana yang terkait dengan sertifikasi benih tanaman, yang diatur dalam Rancangan Undang Undang Perubahan Undang Undang No 12 Th 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yang lahir sebagai harapan untuk adanya prinsip prinsip keadilan, demokratis, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

SUMMARY

Goals to be achieved in this research, which include (a) identify, classify, and analyze the qualifications of crime, as stipulated in article 61 paragraph (1) letter b and Article 61 paragraph (2) letter b the Act No. 12 Th 1992 Cultivation System, (b) implement and analyze criminal provisions, as stipulated in article 61 paragraph (1) letter b and Article 61 paragraph (2) letter b the Act No. 12 Th 1992, and (c) identify, analyze, and formulate rekonseptualisasi crime related to the certification of seed crops in the Draft the Act on Amendment of Article 61 paragraph (1) letter b and Article 61 paragraph (2) letter b the Act No. 12 Th 1992. Therefore, the method of approach to the problem which is used in this study, which includes the approach to the laws and regulations or the statute of approach and approach conceptual concept or approach.

The substance of this research, is part of the substance of the dissertation research, which include (a) the concept of crop seed certification, (b) the concept of crime associated with the certification of seed crops, and (c) policies through rekonseptualisasi criminal legislation relating to seed certification plant. In this case, the discovery of the concept of crime associated with the certification of seed plants through the establishment of legal theory or theories rechts vorming and legal discovery or finding rechts associated with the theory of nature against the law, which is supported by the existence of the principle of legal principle and legal policy in the laws and regulations, among others the principle of formation, the principle of substance, and specific areas of law principle in the laws and regulations in addition to the principle of legal policy within the laws and regulations, including national policy, public policy, policy implementers, and technical policy. Thus, research directed at the preparation of draft laws through criminal rekonseptualisasi activities related to the certification of seed plants. In this case, rekonseptualisasi crime or the discovery of concepts associated with the certification of seed crops, which is set in the Draft the Acts Amendment No 12 Th 1992 on Plant Cultivation System, which was born as a hope for the principle of fairness, democratic, environmentally, and sustainable.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, LJV, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001 .
- Ardhiwisastra, Yudha Bakti, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung, 2008,
- Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- - - - -, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007,
- Black Henry Campbell, Black's Law Dictionary, St. Pul Min : west Publishing Company, 1979
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Jilid I, Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2002
- Husein Wahyudin dan Hufron, Hukum Politik dan Kepentingan, Laks bang, Surabaya, 2008
- Kuswanto, Hendarto, Dasar dasar Teknologi, Produksi, dan Sertifikasi Benih, Andi, Yogyakarta, 1996
- Lembaga Administrasi Negara, Sistem Administrsi Negara Jilid II, Hajimasagung, Jakarta, 1995
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Muladi dan Nawawi, Barda, Teori teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984
- Najih, Mokhamad, Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi, In Trasns Publishing, Malang, 2008
- Natabaya, HAS, Sistem Peraturan Perundang undangan Indonesia, Konstitusi Press Tatanusa, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Ruba'i, Masruchin dan Djazuli, Made S, Hukum Pidana I, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Madang, 1989
- Schaffmeister, D; Keijzer, N; dan Sutorius, E.PH, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 2004

Sianturi, SR, Asas asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, AHM – PTHM, Jakarta, 1986

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Sudjito, Bambang, Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perbenihan Tanaman (Studi di Balai Pengawasan dan Sertifikasi benih Surabaya), Penelitian Dana DPP, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2007

-----, Kendala dan Tantangan Sistem Peradilan Pidana Dalam Kasus Perbenihan Tanaman Di Wilayah Kabupaten Kediri, Penelitian Dana Swadaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2008

Sunggono, Bambang, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Tanya, Bernard L, Simanjuntak, Yoan N dan Hage, Markus Y, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV Kita, Surabaya, 2007

Jurnal, Majalah, dan Surat Kabar Harian :

Anonymous, "Membangun Kedaulatan Petani Atas Benih", Salam, Majalah Pertanian Berkelanjutan, Edisi No 2 September 2007

Peraturan perundang undangan :

- - - - -, Undang Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman, UU No 12 Th 1992 Lembaran

Negara Republik Indonesia Th 1992 No 46 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3478

- - - - -, Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman, PP No 44 Th 1995 Lembaran

Negara Republik Indonesia Th 1995 No 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3616

- - - - -, Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, Peraturan Menteri Pertanian No 39 / Permentan / OT.140 / 8 / 2006

- - - - -, Peraturan Menteri Pertanian tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, Peraturan Menteri Pertanian No 38 / Permentan / OT.140 / 8 / 2006